

TRANSFORMASI SOSIAL DAN SPASIAL KAMPUNG WISATA DI YOGYAKARTA:

Memahami Produksi Ruang Dalam Pariwisata Melalui Teori Lefebvre

Yusuf Hermawan^{1*}, Danny Rizky Ramadhan², Wisnu Pramudya³, Dyah Kemala Firdausi⁴

<http://doi.org/10.5614/wpar.2026.24.1.03>

Diserahkan : 20 November 2025

Diterima: 1 Desember 2025

Diterbitkan: 30 Juni 2026

*Penulis korespondensi, e-mail:
yusuf.yuh@bsi.ac.id

Penelitian ini membahas dilema pengembangan kampung wisata yang muncul akibat ketegangan antara kebutuhan ruang untuk wisatawan dan keterbatasan ruang hidup warga lokal. Dalam konteks perkotaan yang padat, kampung wisata mengalami transformasi spasial dari ruang hunian menjadi ruang wisata yang sarat kepentingan ekonomi, estetika, dan sosial. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan paradigma kritis, menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Analisis dilakukan dengan kerangka teori produksi ruang Lefebvre (1991) yang meliputi tiga dimensi: *spatial practice*, *representations of space*, dan *representational space*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level praktik, warga beradaptasi secara improvisatif terhadap tekanan pariwisata dengan mengubah ruang domestik menjadi ruang ekonomi. Pada level representasi, kebijakan dan estetika ruang yang dikendalikan oleh pemerintah serta pelaku wisata menimbulkan hegemoni terhadap citra ruang lokal. Sementara itu, pada level makna, terjadi pergeseran identitas dari ruang komunal menjadi ruang konsumsi wisata.

Kata Kunci: Kampung Wisata, Produksi Ruang, Kepadatan Penduduk, Keadilan Spasial, Komodifikasi Ruang.

Selama satu dekade terakhir, pengembangan kampung wisata telah menjadi salah satu strategi populer dalam kebijakan pembangunan pariwisata di Indonesia (Kemenparekraf, 2022). Pemerintah pusat, daerah, hingga pengelola lokal mendorong lahirnya kampung wisata sebagai upaya pemerataan ekonomi (Febrian & Suresti, 2020), pelestarian lingkungan (Hasanah et al., 2024) dan budaya lokal (Hernawati & Sungkawa, 2025), serta penguatan peran masyarakat dalam mengelola potensi wisata yang ada di wilayahnya (Palimbunga, 2017). Model ini diharapkan mampu menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan kepariwisataan sehingga dapat memperoleh manfaat yang lebih besar.

Meskipun demikian, pengembangan kampung wisata tidak selalu berjalan lancar dan sesuai harapan, khususnya di wilayah perkotaan padat penduduk. Muncul berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat lokal seperti kenaikan harga tanah (Hermawan, 2016), alih fungsi lahan (Zulfida, 2014), hingga pergeseran nilai sosial budaya (Rana et al., 2023). Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya fenomena perubahan pola produksi dan konsumsi ruang. Jika sebelumnya ruang dan lahan di perkampungan digunakan untuk aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat lokal, sebaliknya dengan adanya pariwisata, masyarakat lokal harus berbagi ruang dengan

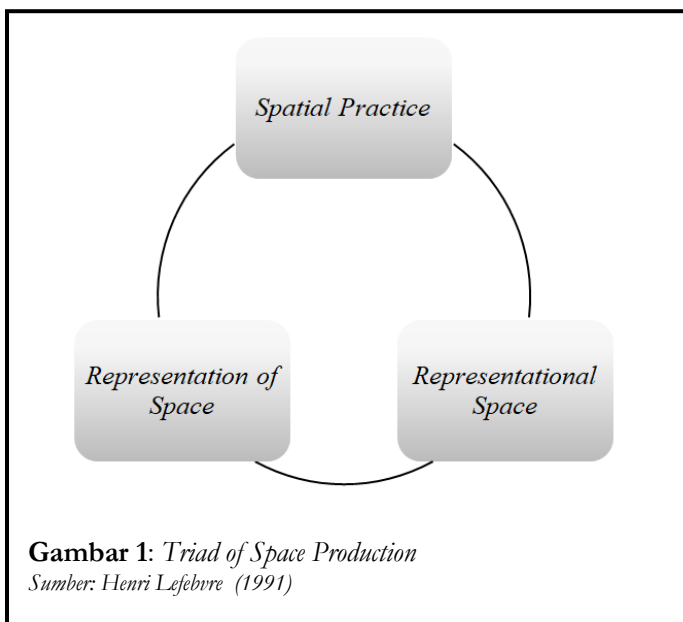
wisatawan. Fenomena tersebut tampak jelas pada sejumlah kampung wisata yang ada di Yogyakarta seperti Pakualam, Umbulharjo, Rejowinangun, Sayidan, Sosromenduran, Karangwaru, dan lain sebagainya (Hadi, 2024; Ika et al., 2022; Rivandi et al., 2022).

Peningkatan jumlah wisatawan mendorong adanya perubahan fungsi lahan di kampung-kampung tersebut, seperti *homestay*, restoran, kafe, toko oleh-oleh, parkir, dan berbagai fasilitas wisata lainnya. Akibatnya, muncul tumpang tindih antara aktivitas masyarakat lokal dan wisatawan yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan sosial ekonomi lokal. Kemudian, muncul asumsi bahwa perubahan pola produksi dan konsumsi ruang ini hanya menguntungkan sebagian anggota masyarakat dan berpotensi merugikan anggota lainnya. Sebagai contoh, anggota masyarakat yang menjadi tuan tanah dapat mengalihfungsikan, menjual atau menyewakan lahannya sebagai fasilitas pariwisata sehingga memperoleh keuntungan (Pamungkas & Mukhtali, 2015). Sedangkan bagi anggota masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan kepemilikan lahan, kemunculan fasilitas-fasilitas pariwisata dan adanya mobilitas wisatawan berdampak negatif bagi aktivitas kehidupan warga seperti berkurangnya sawah sebagai lahan garapan, polusi suara, dan berkurangnya ruang terbuka sosial (Semara IM &

Saputra I.P (2015). Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang dapat mengungkap fenomena ini secara lebih mendalam agar pengembangan kampung wisata tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan dari segi sosial ekonomi namun juga dari segi fisik spasial.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroiti isu-isu fisik spasial dalam pengembangan kampung wisata. Aini et al. (2021) dalam kajiannya di beberapa kampung wisata yang ada di Raja Ampat menemukan adanya konflik pemanfaatan ruang akibat pengelolaan tarif Kartu Jasa Lingkungan (KJL) yang kurang baik dan lemahnya kelembagaan pariwisata sehingga kinerja kampung wisata dianggap kurang maksimal. Penelitian lainnya, oleh Zulfida (2014) mengkaji transformasi tata ruang di Kampung Wisata Batik Pesindon, Pekalongan. Akibat berkembangnya pariwisata, terjadi perubahan alih fungsi ruang baik yang bersifat pribadi maupun publik. Perubahan yang paling signifikan terlihat pada bertambahnya jumlah toko batik dan industri batik rumahan sebagai bentuk respon ekonomi masyarakat lokal terhadap pariwisata.

Kemudian, penelitian di Kampung Wisata Desa Karangwaru, di Yogyakarta oleh Ika et al. (2022) menunjukkan bahwa akibat berkembangnya pariwisata, masyarakat lokal menghadapi tantangan dalam upaya pelestarian lingkungan. Lahan yang semakin sempit dan ruang yang semakin terbatas menyebabkan masyarakat memilih teknik penghijauan vertikultur, yaitu menanam secara vertikal dengan media yang disusun bertingkat. Sebaliknya, penelitian oleh Pramono et al. (2021) di Kampung Wisata Keranggan, Tangerang menemukan bahwa untuk meningkatkan daya tarik wisata, masyarakat lokal memanfaatkan sebagian ruang dan lahan di kampungnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang lebih menarik seperti pembangunan ruang belajar di bawah jembatan Cisadane.



Penelitian-penelitian tersebut, meskipun berfokus pada isu ruang dan lahan di kampung wisata namun lebih berfokus pada aspek ekonomi, lingkungan, dan aspek manajemen pariwisata lainnya. Belum banyak yang mengkaji bagaimana ruang kampung diproduksi dan dimaknai ulang oleh masyarakat lokal serta pelaku wisata dalam konteks pengembangan pariwisata di perkotaan padat penduduk. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi adanya kesenjangan penelitian tersebut dengan memanfaatkan Teori produksi ruang (Lefebvre, 1991) yang menekankan pada aspek sosial dari ruang sebagai lensa analisis.

Menurut Lefebvre (1991) ruang dalam kehidupan masyarakat bukanlah entitas netral atau sekadar wadah fisik, melainkan hasil dari proses sosial yang diproduksi akibat adanya interaksi di antara anggota masyarakat, pengalaman subjektif, kekuasaan, dan makna simbolik. Teori ini melihat ruang sebagai hal produktif (Lefebvre, 1991; McKercher et al, 2015) dan pandangan ini terus berkembang, khususnya dalam konteks perencanaan ruang kota. Dengan demikian, penggunaan teori produksi ruang sebagai lensa atau pisau analisis dalam penelitian ini dapat membantu mengungkapkan bagaimana ruang kampung wisata tidak hanya diatur dan dimanfaatkan, tetapi juga diperebutkan dan dimaknai oleh berbagai aktor yang ada di dalamnya. Selain itu, teori ini juga dipilih karena dianggap mampu menjelaskan dimensi politik, sosial, dan kultural dari perubahan ruang yang mungkin belum terungkap selama ini.

Karakteristik Ruang dan Pola Penggunaan: Dari Ruang Hunian ke Ruang Wisata

Temuan lapangan menunjukkan adanya transformasi fungsi ruang di kampung wisata. Pekarangan dan halaman depan rumah yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas domestik berubah menjadi *homestay*, kios, atau area parkir. Perubahan ini menandai pergeseran nilai ruang dari fungsi hunian menuju komoditas wisata. Dalam kerangka Lefebvre (1991), kondisi tersebut mencerminkan munculnya *spatial practice* yang baru, yaitu cara ruang digunakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Aktivitas domestik warga kini bersaing dengan aktivitas wisatawan sehingga batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi semakin kabur. Warga kini menyesuaikan rutinitas rumah tangga dengan ritme wisata. Sebagai contoh, dari hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa warga menunda kegiatan mencuci pada pagi hari karena halaman rumah telah digunakan wisatawan untuk berfoto. Fenomena ini mengindikasikan bahwa praktik spasial masyarakat mengalami perubahan mengikuti pola aktivitas pariwisata.

Di balik proses adaptasi tersebut, muncul ketegangan antara ruang hidup warga dan ruang konsumsi wisatawan. Lefebvre menyebut proses ini sebagai kolonisasi ruang sehari-hari oleh kapitalisme, ketika nilai guna ruang digantikan oleh nilai tukar ruang. Dengan demikian,

kampung tidak lagi semata-mata dipahami sebagai tempat tinggal, tetapi menjadi bagian dari sirkuit ekonomi pariwisata

Melalui teori *triad of spatial production* dari Lefebvre (1991), ruang kampung wisata dapat dipahami sebagai hasil dari proses produksi sosial yang kompleks, yaitu:

1. Pada level *spatial practice*, warga beradaptasi terhadap tekanan spasial melalui strategi ekonomi skala kecil, namun secara bersamaan kehilangan sebagian kontrol atas ruang hidupnya.
2. Pada level *representations of space*, kebijakan dan desain pariwisata membentuk ruang yang direncanakan secara *top-down* dan sering kali mengabaikan kebutuhan domestik warga.
3. Sementara itu, pada level *representational space*, makna ruang bergeser dari simbol kebersamaan menjadi ruang konsumsi dan estetika visual bagi wisatawan.

Dengan demikian, dilema pengembangan kampung wisata tidak hanya berkaitan dengan persoalan fisik seperti kepadatan dan keterbatasan ruang, tetapi juga menyangkut perebutan makna dan kekuasaan dalam produksi ruang antara warga, pelaku wisata, dan pemerintah. Hasil observasi dan analisis terhadap dokumen perencanaan menunjukkan bahwa sebagian ruang hunian telah beralih fungsi menjadi ruang komersial wisata, seperti *homestay*, kafe kecil, dan toko cenderamata, terutama di sepanjang ruas jalan utama kampung. Perubahan ini paling intensif terjadi di lokasi-lokasi populer untuk berfoto

Alih fungsi ruang tersebut mencerminkan proses *touristification* pada skala mikro. Nilai ekonomi jangka pendek, seperti pendapatan dari *homestay*, sewa tempat usaha, dan jasa fotografi, mendorong warga mengonversi ruang privat menjadi ruang publik-komersial. Proses ini mengikuti logika ekonomi plural, di mana rumah yang mudah diakses wisatawan dianggap lebih menguntungkan jika diubah menjadi *homestay* atau kedai kecil. Namun perubahan ini berlangsung secara spontan tanpa didukung aturan zonasi kampung yang jelas. Akibatnya, muncul konflik penggunaan ruang, misalnya kebutuhan parkir yang mengambil trotoar atau pekarangan warga. Adapun konsekuensi spasial dari proses tersebut meliputi:

1. Berkurangnya luas ruang privat untuk kegiatan domestik.
2. Meningkatnya kepadatan fungsi pada malam hari di ruas tertentu akibat kerumunan wisatawan, kebisingan, dan sampah.
3. Meningkatnya tekanan terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi di titik-titik wisata.

Kepadatan Penduduk: Dampak Ruang Publik dan Daya Dukung Lingkungan

Hasil observasi menunjukkan bahwa ruang terbuka publik, seperti lapangan, taman kecil, dan trotoar, semakin terbatas. Ruang-ruang tersebut sering digunakan sebagai lokasi parkir informal atau tempat berdagang. Kepadatan penduduk memperparah konflik fungsi ruang. Ketika ruang publik semakin sempit, tekanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, seperti parkir, ruang tunggu, dan area foto mengurangi ruang yang secara tradisional berfungsi sebagai ruang sosial warga.

Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Ruang komunal semakin berkurang, kapasitas resiliensi lingkungan menurun akibat saluran drainase tersumbat dan penumpukan sampah, serta potensi konflik antarwarga meningkat. Dari perspektif lingkungan, kampung wisata telah melampaui kapasitas daya dukung sosial-spasialnya pada musim kunjungan puncak, sehingga memerlukan intervensi pengelolaan yang lebih sistematis.

Fenomena kepadatan penduduk menunjukkan bahwa ruang publik mengalami desakralisasi fungsi sosial dan berubah menjadi ruang ekonomi akibat tekanan pariwisata. Dalam terminologi Lefebvre (1991):

1. Pada tataran *spatial practice*, warga menggunakan ruang secara improvisatif demi kelangsungan hidup sehingga batas antara ruang privat dan publik semakin kabur.
2. Pada tataran *representations of space*, kebijakan tata ruang pariwisata lebih menekankan penciptaan citra estetis yang berorientasi wisatawan dan mengabaikan aspek sosial serta ekologis.
3. Pada tataran *representational space*, ruang kehilangan makna afektifnya sebagai simbol kebersamaan dan keseharian warga.

Kontradiksi ini mencerminkan proses produksi ruang yang timpang. Kebutuhan wisatawan diprioritaskan dibandingkan hak dasar warga atas lingkungan yang sehat, ruang terbuka, dan kenyamanan hidup. Daya dukung lingkungan kemudian menjadi batas fisik sekaligus simbolik dari konflik sosial yang menyertai transformasi kampung wisata.

Mekanisme Negosiasi Ruang: Praktik Lokal, Peran Lembaga, dan Kelemahan Regulasi

Negosiasi ruang antara warga, pelaku wisata, dan aparat lokal umumnya berlangsung secara spontan melalui pertemuan komunitas informal atau peran tokoh masyarakat. Dokumen kebijakan di tingkat kelurahan memang tersedia, tetapi bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik penggunaan campuran antara hunian dan pariwisata. Ketiadaan instrumen tata kelola ruang yang rinci, seperti panduan zonasi mikro, aturan jam operasional, lokasi parkir terpusat, dan mekanisme

kompensasi penggunaan ruang publik, mendorong munculnya solusi-solusi improvisatif.

Praktik lokal berupa kesepakatan lisan memberikan fleksibilitas, tetapi lemah dari sisi akuntabilitas. Temuan ini sejalan dengan literatur tata kelola pariwisata yang menekankan pentingnya skema pengelolaan bersama yang partisipatif dan jelas (Goodwin, 2017; Milano et al., 2019). Namun, pengelolaan bersama juga menuntut kapasitas kelembagaan dan modal sosial yang tidak selalu merata di setiap kampung.

Peran pemerintah kelurahan cenderung bersifat reaktif, yakni menangani persoalan setelah konflik muncul, bukan merancang perencanaan ruang jangka panjang secara proaktif. Lembaga non pemerintah/LSM dan komunitas terkadang mengisi kekosongan tersebut, tetapi skalanya masih terbatas.

Dalam dialektika ini, ruang kampung wisata menjadi arena produksi sosial hasil interaksi antara kekuasaan ekonomi pariwisata, birokrasi pemerintah, dan imajinasi kultural masyarakat. Lefebvre menegaskan bahwa ruang selalu merupakan produk relasi sosial yang dinamis dan bersifat politis. Dalam konteks penelitian ini, politik ruang tampak dalam pertarungan antara hak warga atas tempat tinggal dan kepentingan ekonomi pariwisata yang menuntut ruang baru. Oleh karena itu, dilema pengembangan kampung wisata bukan semata persoalan tata ruang atau kepadatan fisik, tetapi manifestasi dari produksi ruang yang timpang secara sosial.

Strategi Adaptasi Warga: Formal dan Informal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga mengembangkan berbagai strategi adaptasi, yaitu:

1. Formal/terorganisir: pembentukan kelompok *homestay* dengan aturan internal, iuran kebersihan, jadwal giliran parkir.
2. Informal: menetapkan zona tidak resmi untuk aktivitas domestik, melakukan negosiasi harga sewa, serta menyesuaikan jam operasional usaha.

Strategi adaptasi yang bersifat kolektif (misalnya kelompok *homestay*) terbukti lebih efektif dalam mengelola dampak eksternal karena memungkinkan regulasi internal dan distribusi manfaat yang lebih merata. Sebaliknya, strategi individual cenderung memperkuat persaingan ruang dan berpotensi memicu konflik. Temuan ini menunjukkan pentingnya modal sosial berupa kepercayaan dan jaringan dalam pengelolaan ruang bersama. Namun, adaptasi informal bersifat sementara dan rentan ketika tekanan ekonomi meningkat kembali.

Analisis berbasis Lefebvre membuka peluang bagi pendekatan kebijakan kampung wisata yang tidak hanya mengatur penggunaan ruang, tetapi juga mengakui pluralitas makna ruang. Beberapa implikasi yang dapat dirumuskan:

1. Desentralisasi pengambilan keputusan spasial: kebijakan zonasi kampung wisata harus dirumuskan bersama warga agar *representations of space* tidak menindas *spaces of representation*.
2. Restorasi ruang hidup: perlindungan area domestik dan ruang komunal (halaman, gang, dan ruang publik kecil) sebagai bentuk keadilan spasial.
3. Konsep wisata berbasis masyarakat perlu direkonstruksi tidak hanya sebagai partisipasi ekonomi, tetapi juga sebagai partisipasi epistemik, yaitu hak warga untuk mendefinisikan ruang dan identitasnya sendiri.
4. Produksi ruang yang *hibrid*: mengakui bahwa ruang kampung wisata tidak harus dipisahkan antara untuk wisata dan untuk warga, namun dapat menjadi ruang *hibrid* yang dinegosiasikan secara terus-menerus melalui norma lokal

Dengan demikian, teori Lefebvre membantu membaca kampung wisata bukan sekadar sebagai destinasi, melainkan sebagai produk sosial dari relasi kuasa, ekonomi, dan budaya. Ruang kampung wisata adalah hasil dialektika antara ruang yang direncanakan, ruang yang dijalani, dan ruang yang dimaknai. Selain itu, berdasarkan data lapangan, beberapa prinsip terbukti relevan untuk menengahi dilema ruang:

1. Zonasi mikro partisipatif: pembagian fungsi ruang pada skala jalan/RT berbasis partisipasi warga untuk menetapkan area wisata, area domestik, dan area campuran.
2. Sistem parkir terpusat dan *shuttle* lokal: mengurangi penggunaan pekarangan dan trotoar sebagai parkir: difasilitasi oleh kesepakatan bersama dan subsidi awal dari pemerintah kelurahan.
3. Aturan jam operasional dan kodifikasi kesepakatan lisan: transformasi praktik-praktik informal menjadi peraturan lokal yang disepakati.
4. Mekanisme kompensasi dan reinvestasi: iuran wisata atau pajak mikro yang dikembalikan ke infrastruktur lokal (kebersihan, sanitasi, ruang terbuka).
5. Pembangunan kapasitas dan inklusi: pelatihan manajemen *homestay*, literasi keuangan untuk warga yang terdampak, dan penyertaan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan.
6. Analisis kebijakan: intervensi ini menuntut kombinasi tindakan: regulasi kelembagaan dari pemerintah lokal, fasilitasi modal awal, dan penguatan modal sosial. Solusi *top-down* tanpa legitimasi lokal berisiko ditolak. Sebaliknya, solusi *bottom-up* tanpa dukungan sumber daya pemerintah cenderung tidak berkelanjutan

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan kampung wisata merupakan proses produksi ruang yang menghadirkan dilema spasial dan sosial yang kompleks antara kepentingan pariwisata dan kebutuhan ruang hidup warga lokal. Transformasi ruang dari ruang hunian menjadi ruang wisata tidak hanya berlangsung secara fisik, tetapi juga secara konseptual dan ideologis. Dengan menggunakan teori *Triad of Spatial Production* (Lefebvre, 1991), temuan penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pada level praktik ruang (*spatial practice*), warga melakukan adaptasi terhadap tekanan spasial dan ekonomi melalui pemanfaatan ruang secara improvisatif, seperti mengubah rumah menjadi *homestay*, warung, atau fasilitas pendukung wisata, yang pada saat yang sama mengurangi kenyamanan dan privasi kehidupan domestik
2. Pada level representasi ruang (*representations of space*), pemerintah dan pengelola wisata memproduksi kampung sebagai ruang budaya yang atraktif melalui standar estetika dan perencanaan tertentu yang lebih merefleksikan logika kapital dan konsumsi wisatawan dibandingkan kebutuhan sosial warga.

3. Pada level ruang yang dimaknai (*representational space*), muncul konflik makna antara ruang sebagai tempat tinggal dan ruang sebagai atraksi wisata, sehingga identitas komunitas berada dalam posisi ambivalen antara kebanggaan atas visibilitas pariwisata dan hilangnya rasa kepemilikan atas ruangnya sendiri.

Kondisi kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan semakin memperparah kontradiksi tersebut melalui tekanan terhadap infrastruktur, berkurangnya ruang publik, serta terlampauinya daya dukung lingkungan. Dengan demikian, pengembangan kampung wisata perlu dipahami sebagai arena produksi ruang yang bersifat politis, di mana kepentingan ekonomi, estetika, dan sosial terus bernegosiasi dalam ruang yang terbatas.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana kapitalisme pariwisata bekerja pada skala mikro melalui mekanisme dominasi, resistensi, dan negosiasi ruang. Secara praktis, temuan ini memberikan dasar bagi perumusan kebijakan tata kelola kampung wisata berbasis komunitas yang menekankan keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, perlindungan daya dukung lingkungan, dan pemenuhan hak warga atas ruang hidup yang layak melalui prinsip keadilan spasial.

Daftar Pustaka

- Goodwin, H. (2017). The challenge of overtourism. Responsible Tourism Partnership Working Paper 4.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2022). Panduan Pengembangan Desa dan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Lefebvre, H., (1991). The Production of Space. Oxford: Blackwell.
- Milano, C., Cheer, J. M., & Novelli, M. (2019). Overtourism: Excesses, discontents and measures in travel and tourism. Wallingford: CABI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Wijayanti, A., & Suryawan, I. N. (2021). Tantangan Pengelolaan Kampung Wisata di Kawasan Perkotaan: Studi Kasus di Kota Yogyakarta. Jurnal Pariwisata dan Budaya, 16(2), 87–102.
- Aini, N., Satria, A., Wahyuni, E. S., & Bengen, D. G. (2021). Program Strategis dalam Mengatasi Kendala Kelembagaan Pengelolaan Ekowisata Bahari di Raja Ampat (Studi Kasus: Kampung Wisata Distrik Meos Mansar). Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 11(2), 127–142. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9655>
- Febrian, A. W., & Suresti, Y. (2020). Pengelolaan Wisata Kampung Blekok Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Community Based Tourism Kabupaten Situbondo. Jurnal Administrasi Bisnis, 9(2), 139–148. <https://doi.org/10.14710/jab.v9i2.25308>
- Hadi, W. (2024). Menggali Potensi Kampung Wisata Di Kota Yogyakarta Sebagai Daya Tarik Wisatawan. Journal of Tourism and Economic, 2(2), 129–139. <https://doi.org/10.36594/jtec/08yq9670>
- Hasanah, N., Makhmudiyah, N., & Virgiawan, D. B. (2024). Geblak (Gerakan Balik Kanan) Dalam Upaya Pelestarian Sosial-Lingkungan Masyarakat Jambangan Sebagai Kampung Wisata Ekoriparian. SOSEARCH : Social Science Educational Research, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.26740/sosearch.v4n2.p1-12>
- Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglangeran terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. Jurnal Pariwisata, 3(2), 105–117. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp>
- Hernawati, Y., & Sungkawa, K. (2025). Peran Keraton Kacirebonan dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Melalui Kampung Wisata Kacirebonan. UTAMA: Jurnal Pariwisata Prima, 3(1), 30–38.
- Ika, S. R., Achmad, N., Sriyono, E., & Widagdo, A. K. (2022). Pengembangan Kampung Wisata Desa

Karangwaru sebagai Wisata Edukasi di Yogyakarta. Seminar Nasional Hasil Pengabdian (SNHP) 2022 , 25–32.

Lazuardina A., & Ghassani, S.A. (2023). Dampak Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal di Kawasan Wisata (Desa Ciburial Kabupaten Bandung). Jurnal ITB. <https://journals.itb.ac.id/index.php/wpar>

McKercher, B., Wang, D., & Park, E. (2015). Social Impacts as A Function of Place Change. *Annals of Tourism Research*, 50, 52–66. doi:10.1016/j.annals.2014.11.002

Palimbunga, I. P. (2017). Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua: Kajian Pariwisata Budaya. *MELANESIA: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra Dan Bahasa*, 1(2), 15–32.

Pamungkas, I. T. D., & Muktiali, M. (2015). Pengaruh Keberadaan Desa Wisata Karangbanjar terhadap Perubahan Penggunaan Lahan, Ekonomi dan Sosial Masyarakat. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(3), 361–372.

Pramono, R., Juliana, J., & Agung Wicaksono, E. (2021). Pengembangan Eduwisata di Kampung Wisata Keranggan Kota Tangerang Selatan. *Prosiding*

Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR), 4, 842–847.

<https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v4i0.1452>

Rana, A. M., Kinseng, R. A., Siwi, M., & Murdianto. (2023). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Desa Wisata. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 7(1), 186–198.

<https://doi.org/10.29244/jskpm.v7i1.1126>

Rivandi, P., Putri, R. A., & Rahayu, M. J. (2022). Komponen Integrasi Fisik pada Kampung Wisata Sosromenduran Yogyakarta. *Desa-Kota*, 4(1), 53.

<https://doi.org/10.20961/desa-kota.v4i1.53680.53-66>

Semara I.M., & Saputra I.P. (2015). Dampak Pengembangan Destinasi Pariwisata Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Studi Kasus di Desa Petitenget Kuta Utara Badung. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management/* 6(1). 49-58.

Zulfida, A. (2014). Transformasi Tata Ruang Permukiman Kampung Wisata Batik Pesindon Pekalongan [Master Thesis]. Universitas Diponegoro.



Yusuf Hermawan, S.Tr.Par., M.Sc. merupakan dosen D3 Perhotelan Universitas Bina Sarana Informatika. Beliau menamatkan pendidikan D3 Pariwisata Universitas Gadjah Mada, D4 Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada, dan S2 Kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada.



Wisnu Pramudya, M.Sc.

merupakan dosen di Program Studi Pariwisata, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Sebelumnya, beliau menamatkan pendidikan S-2 Kajian Pariwisata di Universitas Gadjah Mada dan S-1 Destinasi Pariwisata di Universitas Udayana.



Ir. Danny Rizky Ramadhan, S.P.W.K., M.Sc., IPP. Beliau adalah dosen D4 Manajemen Bisnis Pariwisata USU, Medan. Fokus pada penelitian perencanaan dan pengembangan destinasi wisata, ekowisata, pariwisata perkotaan dan pariwisata berkelanjutan.



Dyah Kemala Firdausi, M.Sc.

merupakan dosen di Program Studi Pariwisata, Universitas Horizon Indonesia. Sebelumnya, beliau menamatkan pendidikan S-2 Kajian Pariwisata di Universitas Gadjah Mada dan S-1 Sastra Inggris di Universitas Negeri Yogyakarta.